

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA *IMPLEMENTATION OF PANCASILA AS AN EFFORT TO PREVENT RADICALISM AND TERRORISM AMONG INDONESIAN SOCIETY*

Antonious Febrian Putera Kusuma¹, Dika Aditya², Farhan Fadhil Aziz³, Nabila F Samadi⁴, Herli Antoni⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallea, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat 16129

Correspondence

Email: antoniusfebrian1902@gmail.com,
dikaaditya180105@gmail.com,
farhanfadhilaziz@gmail.com,
nabilafsamadi@gmail.com,
herli.antoni@unpak.ac.id

No. Telp:

Submitted 18 Desember 2024

Accepted 21 Desember 2024

Published 28 Desember 2024

ABSTRAK

Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan integritas sosial di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Artikel Jurnal ini membahas implementasi nilai Pancasila dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila di sekolah dan komunitas memiliki dampak positif dalam membangun sikap toleransi dan cinta damai, sedangkan penegakan hukum yang berbasis nilai Pancasila mampu memberikan efek jera bagi pelaku terorisme. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi dalam menciptakan lingkungan yang sikap terhadap radikalisme. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat membentuk ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di masa yang akan datang.

ABSTRACT

Radicalism and terrorism are serious threats to national security and social integrity in Indonesia. Pancasila as a national ideology has an important role in preventing the spread of radical ideas that have the potential to threaten the unity and integrity of the Indonesian nation. This journal article discusses the implementation of Pancasila values in efforts to prevent radicalism and terrorism. The research results show that Pancasila education in schools and communities has a positive impact in building attitudes of tolerance and love of peace, while law enforcement based on Pancasila values is able to provide a deterrent effect for perpetrators of terrorism. Apart from that, active community participation in supporting Pancasila values is the foundation for creating an environment that is resistant to radicalism. Through the integration of Pancasila values, it is hoped that strong social resilience can be formed to face the threat of radicalism and terrorism in the future.

Pendahuluan

Pada zaman sekarang, banyak terjadi radikalisme di kalangan masyarakat dengan tujuan memecah belah bangsa. Ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk ideologi dan non-ideologi, seperti dendam, kebencian, ekonomi, dan ketidakpercayaan. Faktor ideologi sangat sulit untuk dihilangkan karena melibatkan semua aspek masyarakat. Faktor ekonomi mudah dihilangkan karena faktor ini terjadi karena perbedaan ideologi atau kelompok yang hanya ingin memiliki ideologi yang sama dengan gaya hidup mereka, dan cara untuk menghilangkan faktor ini adalah dengan membuat mereka hidup layak dan sejahtera. Ideologi adalah sumber radikalisme di Masyarakat. Sejak bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, para pendiri telah setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, filosofi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan rakyat Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan tata kelola negara, didasarkan pada kelima sila yang terkandung dalam Pancasila: (1) Ketuhanan

Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sangat penting untuk memahami makna yang terkandung dalam Konstitusi 1945, terutama bagian pembukaan. Semua elemen yang membentuk masyarakat Indonesia, termasuk kepribadian bangsa, falsafah, pedoman, dan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, dapat ditemukan dalam Undang-Undang 1945 [1]. Tokoh perumusan pancasila bangsa kita (Founding Fathers) telah lama bercita-cita untuk memiliki makna khusus di balik pembukaan UUD, yang menjadikannya penting. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan." Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menunjukkan a) Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan semua penjajah, dan b) Pernyataan subjektif Bangsa Indonesia untuk menentang dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia. c) Pernyataan yang objektif dari negara Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan perikemanusiaan. d) Pemerintah Indonesia mendukung hak setiap negara Indonesia untuk memiliki kemerdekaan sendiri [1]. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya," kata alinea ketiga dari Konstitusi 1945. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 menunjukkan dua hal: a) motivasi spiritual yang kuat bahwa kemerdekaan kita adalah hasil dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa; dan b) keinginan bersama bangsa Indonesia untuk suatu kehidupan yang berkelanjutan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia dan akhirat. c) adanya pernyataan proklamasi yang diakui [2] sampai ancaman terorisme saat ini menjadi ancaman serius bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengembangan lingkungan strategis di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa ancaman dan konflik telah beralih dari intra-state ke antara negara. Hal ini disebabkan oleh pergeseran cepat teknologi dan arus informasi, yang memaksa setiap negara untuk memperbaiki sistem pertahanan mereka. Sistem pertahanan negara menjadi sangat penting untuk menciptakan dan menjamin stabilitas nasional yang stabil dan berkelanjutan. Pertahanan Indonesia menggabungkan pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan semesta. Jaringan teroris juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan aksinya. Terorisme siber di masa depan mungkin terjadi ketika kelompok terorisme memanfaatkan jaringan internet sebagai media dan pusat kendali. Di sini, media menunjukkan bahwa kelompok teroris ini memanfaatkan jejaring sosial sebagai cara untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya di dalam dan di luar negeri. Selain itu, kelompok teroris juga menggunakan jejaring media sosial untuk menyebarkan propaganda dan menarik anggota baru. Mereka bahkan melakukan bait dunia maya untuk menarik anggota baru ke jaringan mereka. Jaringan internet tidak hanya digunakan oleh kelompok teroris untuk berkomunikasi dan mempekerjakan orang, tetapi juga digunakan oleh mereka untuk memberikan instruksi dan kendali atas sejumlah aksi teror. Misalnya, jaringan internet digunakan oleh kelompok teroris untuk memberikan instruksi tentang cara merakit bom, menentukan sasaran, dan mekanisme pelaksanaan aksi teror. Solahudin, seorang peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, mengatakan bahwa media sosial membuat radikalisme menjadi lebih cepat berkembang. Hasil penelitian yang dia lakukan pada tahun 2017 adalah dasar dari pendapat itu. Media sosial, terutama aplikasi pesan singkat, membantu menyebarkan ideologi radikal, menurut Solahudin. Selama ini, Indonesia telah menjadi

langganan teror, seperti yang dapat kita lihat dari kejadian nyata di Surabaya pada Mei 2018 yang lalu. Selain itu, alasan pemerintah baru mengeluarkan peringatan dini setelah kejadian bom bunuh diri sangat memprihatinkan, dan pemerintah harus memprioritaskan

masalah seperti ini. Korban terbesar adalah masyarakat sipil. Terorisme adalah kejahatan atau tindak pidana luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini, terutama di Indonesia. Akhir-akhir ini, ada hubungan ideologis antara terorisme yang terjadi di Indonesia. sejarah dan politis, dan termasuk dalam dinamika lingkungan strategis secara global dan regional. Namun, tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional, karena sebagian besar aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh orang Indonesia sendiri (Hikam, 2016). Karena negara tidak setuju tentang terorisme dalam konflik bersenjata, belum ada perjanjian atau undang-undang yang dapat mendefinisikan terorisme secara keseluruhan. Namun, faktanya tetap bahwa terorisme yang terjadi pada masa damai dan bersifat internasional (yaitu, tidak terbatas pada wilayah suatu negara dan menunjukkan hubungan transnasional) dapat diklasifikasikan sebagai diskrit (unsur-unsur yang tidak saling berhubungan) tergantung pada situasi. kejahatan yang dilakukan di tingkat internasional, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode kualitatif studi kasus deskriptif digunakan. Metode ini adalah jenis penelitian di mana berbagai sumber informasi dikumpulkan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang situasi, fakta, atau kenyataan tentang suatu kasus tertentu. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana sikap intoleransi di Indonesia mempengaruhi kepercayaan keagamaan. Selanjutnya, hasil analisis dipresentasikan secara deskriptif tematis melalui sumber pustaka yang mendukung penulisan, seperti buku buku dan karya ilmiah. Penelitian ini membahas dua masalah utama: bagaimana intoleransi dan terorisme terjadi di Indonesia, khususnya pada berbagai kelompok agama dan minoritas, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan keamanan nasional. Persepsi yang salah atau negatif terhadap perbedaan agama, suku, atau ideologi sering kali menjadi dasar intoleransi, yang pada akhirnya mengarah pada diskriminasi dan ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu. Terorisme, bersama dengan intoleransi, menjadi ancaman besar bagi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, terorisme berasal dari ideologi ekstremis yang sering berusaha mengubah pemerintahan dan ideologi saat ini dengan pandangan radikal yang dipaksakan. Fenomena terorisme ini juga terkait dengan jaringan transnasional, di mana kelompok teroris lokal berkolaborasi dengan kelompok internasional yang mendukung tindakan dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme

Ada adaptasi dan interaksi di lingkungan sosial masyarakat. Nilai-nilai mengarahkan interaksi ini dan dibatasi oleh norma-norma sosial. Masyarakat menganggap nilai sebagai sesuatu yang bermanfaat dan baik. Jika sesuatu memiliki karakteristik seperti kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiusitas, maka itu dianggap memiliki nilai. Namun, norma adalah peraturan yang berisi aturan atau larangan yang harus diikuti propaganda mereka. Studi ini berfokus pada bagaimana intoleransi dan terorisme dapat mengancam nilai-nilai keberagaman dan kesatuan Pancasila. Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan terkait. Hasil analisis dipresentasikan secara tematis, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk mencegah dan memerangi radikalisme. tidak dapat ditoleransi, Tulisan ini juga membahas upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk membangun masyarakat yang toleran dan kuat untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia. oleh orang untuk menjaga nilai. Sebagai nilai-

nilai dasar negara, nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi panduan atau petunjuk hidup bersama untuk mencapai cita-cita bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar dapat mencegah perpecahan bangsa, orang Indonesia harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sangat penting bagi terwujudnya keteraturan masyarakat, norma dan nilai adalah dua hal yang saling terkait. Nilai dalam hal ini adalah standar, ukuran, anggapan, dan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Apabila setiap masyarakat dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, maka lingkungan sosial masyarakat dapat menjadi teratur. Ada empat jenis nilai:

- a) Nilai etika, yang mengacu pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk esensial;
- b) Nilai estetika, atau nilai keindahan, sering dikaitkan dengan hal-hal, orang, dan peristiwa yang dapat memikat perasaan;
- c) Nilai-nilai agama, atau nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan sang Pencipta
- d) Nilai sosial adalah prinsip yang berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan dan memperlakukan orang lain di lingkungan mereka. Pada dasarnya, Pancasila adalah sistem yang terdiri dari lima prinsip atau nilai.

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap sistem harus memenuhi lima persyaratan berikut:

- a) Merupakan satu kesatuan
- b) Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung pertentangan
- c) Ada hubungan antara komponennya,
- d) Ada keseimbangan dalam kerja sama
- e) Semuanya mengabdikan pada tujuan bersama, yaitu tujuan bersama Pancasila.

Pada tiap sila, ada korelasi yang saling berkesinambungan dan tidak terpisahkan, yang membuat Pancasila dianggap sebagai suatu sistem. Selain itu, Pancasila dapat dikatakan bersifat integralistik dan holistik karena setiap silanya memiliki fungsi yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi insan yang berprinsip keadilan dalam kehidupan sosial dan kesejahteraan yang merata adalah tujuan perilaku Pancasila, yang merupakan inti dari setiap kehendak membangun dari semua sila Pancasila. Untuk menjaga nilai-nilai dan norma etika yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, semua orang harus sadar dan waspada. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia harus dapat mencegah radikalisme. Orang-orang yang telah tertanam dalam prinsip-prinsip Pancasila akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini akan menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan, yang akan mendorong mereka untuk bekerja sama untuk membangun bangsa dan negeri mereka dalam suasana aman, damai, tenteram, dan nyaman.

Untuk mencegah radikalisme, nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasi dengan cara berikut:

- a) Mengakui bahwa nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari semua tingkah laku yang etis;
- b) Mengakui bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari bangsa Indonesia sehingga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;
- c) Menciptakan norma-norma yang bersendikan pada nilai-nilai Pancasila; dan
- d) Menempatkan orang Indonesia di posisi penting dan strategis di antara bangsa lain. Pendidikan Pancasila dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengembangkan karakter ini. Sebaiknya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada usia anak-anak agar mereka menjadi insan yang berkarakter Pancasila.

Selain itu, dunia pendidikan secara umum dapat melakukan upaya untuk merevitalisasi Pancasila. Pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran atau kuliah wajib sejak sekolah

dasar hingga perguruan tinggi. Pada dasarnya, pendidikan Pancasila harus dilakukan secara konsisten untuk membantu proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilainya. Untuk mencegah radikalisme, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Kita harus dapat menghayati, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai instrumen sosialisasi dan edukasi, serta melalui pengembangan jaringan informasi dan teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan Multikultural

Berbagai definisi pendidikan multikultural masih sangat beragam, dan tidak ada yang setuju tentang apakah pendidikan multikultural mengajarkan anak-anak untuk menghargai keragaman budaya atau untuk belajar menghargai keragaman budaya. Menurut Kamanto Sunarto, pendidikan multikultural biasa berarti mengajarkan keragaman budaya dalam masyarakat, menawarkan model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, atau membina siswa untuk menghargai keragaman budaya masyarakat. Menurut HR Tilaar, tujuan pendidikan multikultural di Indonesia adalah untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.

H.A.R. Tilaar mengatakan bahwa tujuan pendidikan multikultural di Indonesia adalah untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Namun, Conny R. Semiawan mengatakan bahwa semua kelompok etnik dan budaya di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi dan mencapai prestasi terbaik di sekolah. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk membangun bangsa yang toleran terhadap perbedaan sosial. Karena lokasinya yang silang dan memiliki banyak pulau, Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Jika kita tidak memahami pentingnya perbedaan, masalah keberagaman dapat menjadi masalah nasional. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia menggunakan prinsip persatuan dan kesatuan, yang akan menghasilkan prinsip kebhinekaan, untuk menyatukan bangsanya. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah inti dari Pancasila. Pengembangan pendidikan multikultural tentunya juga diperlukan untuk mengatasi masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia saat ini. Pendidikan multikultural adalah nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda agar mereka memiliki pemahaman dan sikap multikultural, dapat hidup berdampingan dengan keberagaman, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan siapa yang menjadi mayoritas atau minoritas. Jadi, radikalisme bukan masalah yang menghalangi atau bahkan menghancurkan masa depan bangsa. Pendidikan multikultural akan melindungi generasi muda dari ideologi radikal. Karena itu, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk melindungi sikap, nilai, atau nilai bangsa agar tidak terjerumus oleh pemikiran radikal dan intoleransi yang dapat menyebabkan konflik di antara bangsa dan negara.

3. Faktor – Faktor yang dapat memengaruhi berkembangnya tindak radikalisme di Indonesia

Ideologi yang tidak seimbang selalu memiliki hubungan dengan sikap orang Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ini juga menyebabkan orang Indonesia lupa identitas dan tujuan negaranya. Karena harus menghadapi ketidakpastian saat menerapkan ideologi pancasila, sehingga warga negara melupakan identitas dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, ideologi asing dengan mudah masuk dan melarikan diri melalui sarana media di era modern, yang mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku warga negara. Ini seolah-olah merupakan identitas baru dengan peran yang berbeda dari warga negara; sebaliknya, mereka adalah penganut ideologi asing dengan tujuan dan pendapat yang berbeda dari pancasila, bahkan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip pancasila. Ketidakstabilan ini akan menjadi sangat kuat dan menyebabkan perilaku dan sikap warga negara berubah drastis, terutama jika ada

faktor pendorong dari lingkungan yang buruk dan ajaran yang tidak benar.

Pertama, faktor kognitif Disebabkan oleh faktor ini, muncul dua paham dalam masyarakat Islam: yang pertama percaya bahwa agama ini menyebabkan agama islam mundur, sehingga seorang muslim menginginkan untuk mengejar ketertinggalan dan melepaskan keyakinan agamanya. Ada kemungkinan bahwa ide ini adalah sekularisme yang menentang agama.

- a) Jenis kedua dari pemikiran adalah ketika seseorang mempertimbangkan penentangannya terhadap alam semesta yang dianggap tidak dapat ditoleransi lagi dan percaya bahwa keridhoan dan keberkahan Tuhan tidak akan lagi datang. Dalam hal ini, agama menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Jadi, dua pemahaman ini akan menghasilkan tindakan radikal-destruktif yang melawan agama dan negaranya. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor ekonomi. Ketika seseorang tidak memiliki cukup uang, mereka menjadi kejam dan dapat melakukan apa pun, termasuk teror.
- b) Ketiga, ada komponen politik. Di mana pada faktor ini, kestabilan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi untuk rakyatnya, tujuan negara. Jika ada pemimpin yang adil yang membantu rakyat dan menjamin hak-haknya, warga negara akan merasa bangga pada diri mereka sendiri dan akan selalu memperjuangkan negara mereka.
- c) Faktor sosial keempat. Adanya pemahaman yang salah atau menyimpang menyebabkan konflik atau perselisihan dalam masyarakat. Banyak masalah yang menarik perhatian masyarakat, menyebabkan radikalisme, yang menyebabkan sekelompok orang berpisah dari masyarakatnya. Pada awalnya, sikap ini digunakan untuk menghindari ketidakpastian yang ada di masyarakat. Namun, akhirnya berubah menjadi pandangan yang merugikan masyarakatnya sendiri.
- d) Faktor kelima adalah psikologis. Salah satunya mengalami kesulitan dalam hidupnya, di lingkungannya, atau di tempat kerjanya. Hal ini juga dapat mendorong tindakan anarkis dan melanggar peraturan. Ini adalah hasil dari kegagalan yang dia alami selama hidupnya, yang mengakibatkan isolasi sosial. Keenam, faktor pembelajaran. Meskipun pendidikan bukan penyebab utama gerakan terorisme, pendidikan akan sangat berbahaya jika salah. Pendidikan agama memerlukan perhatian lebih besar karena mengajarkan kesabaran, kesantunan, dan membenci perbedaan. Kemudian muncul agama yang dia anggap lebih benar daripada yang lain, dan pandangan ini harus diperangi, yang merupakan konsekuensi dari pendidikan yang salah.

4. Implementasi Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Terorisme di Indonesia

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya, para pendiri negara telah menyetujui untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi, falsafah hidup, dan dasar negara. Dengan demikian, Pancasila berlandaskan pada kelima sila:

- (1) Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (3) Persatuan Indonesia;
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
- (5) Keadilan Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia bergantung pada lima sila ini untuk mencapai empat tujuan utamanya, yang disebutkan kembali dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan UUD 1945, orang Indonesia dapat menemukan falsafah, pedoman, dan dasar kebangsaan dan kenegaraan mereka sendiri. Tokoh perumusan pancasila bangsa kita (Founding Fathers) telah lama bercita-cita untuk memiliki makna khusus di balik pembukaan UUD, yang menjadikannya penting. "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan," kata

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menunjukkan

- a) Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan semua penjajah, dan
- b) Pernyataan subjektif Bangsa Indonesia untuk menentang dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia.
- c) Pernyataan bangsa Indonesia secara objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
- d) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa Indonesia.

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya," kata alinea ketiga dari Konstitusi 1945. Alinea ketiga UUD 1945 menunjukkan tiga hal: a) motivasi spiritual yang kuat bahwa kemerdekaan kita adalah hasil dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa; b) keinginan kolektif bangsa Indonesia untuk kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia dan akhirat; dan c) pengukuhan pernyataan proklamasi. Oleh karena itu, tujuan dari alinea pertama dan ketiga adalah untuk mengatasi masalah intoleransi, yang seringkali menggambarkan secara tidak langsung bagaimana konsep hidup menggambarkan penjajahan. keberagaman yang berbeda (menganggap agamanya yang paling benar dan tidak dapat menerima agama lain), dan dilakukan tanpa mempertimbangkan aturan dan landasan visional UUD 1945.

5. Cara Mencegah Pengaruh Tindak Kejahatan Terorisme

Juga terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi.

- a. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar: Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar adalah cara terbaik untuk mencegah terorisme. Karena pemikiran generasi muda yang terus mengembara karena rasa ingin tahu, penting bagi generasi penerus bangsa untuk memahami ilmu pengetahuan ini.
- b. Memahami Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar Memahami ilmu pengetahuan tidak hanya perlu mengetahui apa yang sudah diketahui; memahami apa yang sudah diketahui juga penting. Oleh karena itu, ketika pengetahuan tentang ilmu pengetahuan umum dan agama telah dipahami, pemikiran Anda akan semakin kuat. Akibatnya, Anda tidak akan mudah terpengaruh dan terpengaruh oleh radikalisme dan terorisme, dan Anda dapat mencegah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
- c. Meminimalkan Kesenjangan Sosial: Kesenjangan sosial dapat memicu tindakan terorisme. Oleh karena itu, kesenjangan sosial harus dikurangi. Kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat harus dikurangi untuk mencegah tingkat pemahaman terorisme meningkat di suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk merangkul mereka yang menjadi perantara dengan masyarakat sekaligus melakukan tindakan langsung kepada mereka. Begitu pula masyarakat, mereka harus sepaham dengan pemerintah dengan mendukungnya dan mempercayainya. Akibatnya, pemerintah akan melaksanakan fungsinya sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali atas pemerintahan negara dengan baik.
- d. Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Menjaga persatuan dan kesatuan adalah upaya untuk mencegah tindakan terorisme di tingkat negara dan masyarakat. Keberagaman atau kemajemukan terjadi dalam sekumpulan orang atau masyarakat, terutama dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai masyarakat. Untuk mencegah tindakan terorisme, sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan selama kemajemukan ini. Dalam kasus terorisme di Indonesia, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tertulis dalam sila-sila Pancasila, adalah langkah pertama.

Kesimpulan

Pancasila memainkan peran penting dalam melawan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Tiga elemen utama—pendidikan, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat—dibahas dalam jurnal ini tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan persatuan, toleransi, dan kesatuan bangsa. Pendidikan dapat menanamkan prinsip-prinsip Pancasila sejak kecil untuk membangun karakter yang damai, toleran, dan cinta. Diharapkan bahwa penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila akan membuat pelaku teroris jera. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sangat penting untuk membangun lingkungan yang tahan terhadap ideologi radikal. Diharapkan bahwa penerapan Pancasila akan menciptakan ketahanan sosial yang kuat.

Daftar Pustaka

- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–28. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275>
- Kartika, I. M. ., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144–3151. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.22548>
- Rani, N. P. (2017). Reaktualisasi Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 345–378. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.174>